

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 5 Maret 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 21	Kamis, 5 Maret 2020	Kemantapan Jalan "Terancam"	Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyantanto mengatakan bahwa secara rata-rata peringkat kemantapan jalan nasional ada di posisi 91,20% dan pihaknya berupaya untuk meningkatkan hingga ke angka 94%. Menurutnya, penundaan penerapan pembatasan truk over dimension overload (ODOL) yang akan dimulai pada 2023 akan berpengaruh terhadap target kemantapan jalan nasional secara keseluruhan. "Hal ini, dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan lebih dini yang berdampak pada menurunnya merupakan jalur-jalur vital yang menjadi urat nadi logistik dan perekonomian nasional," katanya.

Judul	Kemantapan Jalan "Terancam"	Tanggal	Kamis, 5 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyantanto mengatakan bahwa secara rata-rata peringkat kemantapan jalan nasional ada di posisi 91,20% dan pihaknya berupaya untuk meningkatkan hingga ke angka 94%. Menurutnya, penundaan penerapan pembatasan truk over dimension overload (ODOL) yang akan dimulai pada 2023 akan berpengaruh terhadap target kemantapan jalan nasional secara keseluruhan. "Hal ini, dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan lebih dini yang berdampak pada menurunnya umur layanan jalan. Maka dari itu, kebutuhan biaya untuk pemeliharaan jalan makin meningkat," katanya kepada <i>Bisnis</i> , Rabu (4/3). Sugiyantanto menjelaskan bahwa panjang jalan di Indonesia tercatat 541.217 kilometer dengan jalan nasional nontol sepanjang 47.017 kilometer dan jalan tol yang sudah beroperasi 2.093 kilometer. "Jalan nasional dan jalan tol ini merupakan jalur-jalur vital yang menjadi urat nadi logistik dan perekonomian nasional," katanya.		

| PENUNDAAN PEMBATASAN TRUK ODOL |

KEMANTAPAN JALAN "TERANCAM"

Bisnis, JAKARTA — Penundaan pembatasan kendaraan truk kelebihan dimensi dan muatan atau *over dimension overload* dari yang seharusnya mulai Januari 2021 menjadi Januari 2023 dinilai akan memengaruhi target kemantapan jalan nasional.

Agne Yasa
agne.yasa@bisnis.com

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyantanto mengatakan bahwa secara rata-rata peringkat kemantapan jalan nasional ada di posisi 91,20% dan pihaknya berupaya untuk meningkatkan hingga ke angka 94%.

Menurutnya, penundaan penerapan pembatasan truk *over dimension overload* (ODOL) yang akan dimulai pada 2023 akan berpengaruh terhadap target kemantapan jalan nasional secara keseluruhan.

"Hal ini, dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan lebih dini yang berdampak pada menurunnya umur layanan jalan. Maka dari itu, kebutuhan biaya untuk pemeliharaan jalan makin meningkat," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (4/3).

Sugiyantanto menjelaskan bahwa panjang jalan di Indonesia tercatat 541.217 kilometer dengan jalan nasional nontol sepanjang 47.017 kilometer dan jalan tol yang sudah beroperasi 2.093 kilometer.

"Jalan nasional dan jalan tol ini

merupakan jalur-jalur vital yang menjadi urat nadi logistik dan perekonomian nasional," katanya.

Menurutnya, isu terkait dengan truk ODOL ini masih masif, terutama akibat dari inkonsistensi dalam pengawasan dan pengendalian yang bersifat lintas sektor.

"Dampak ODOL terhadap jalan nasional, yaitu tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas, inefisiensi akibat berkurangnya kecepatan kendaraan atau kemacetan, peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan. Anggaran yang dapat dihemat jika tidak terjadi ODOL pada jalan tol, nasional dan provinsi adalah rata-rata sebesar Rp43,45 triliun per tahun," ujar Sugiyantanto.

Ketika dihubungi secara terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa penundaan pembatasan kendaraan ODOL ini pasti akan ada pengaruhnya pada kemantapan jalan. "Pasti ada pengaruhnya ke kemantapan jalannya. Jadi, kalau kemantapan jalan, tapi ODOL masih dibiarkan akhirnya tidak ada hasil maksimal," katanya.

Menurutnya, persoalan yang mendasar adalah jika kendaraan ODOL mau ditertibkan, maka harus ada ketentuan

yang mengatur mekanisme biaya logistik. Pasalnya, selama ini mekanisme tarif diserahkan pada mekanisme pasar.

Oleh karena itu, kata Yayat, dibutuhkan sinergi yang mengatur tentang angkutan logistik dengan berbagai pemangku kepentingan. "Akibatnya pada satu sisi, beban perbaikan ditempatkan pada Kementerian PUPR, tapi pengawasannya tidak dimaksimalkan, harus ada sinkronisasi, bertahap."

JALAN NASIONAL

Sugiyantanto menambahkan bahwa pada tahun ini, pihaknya menargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 369,11

kilometer dengan alokasi anggaran Rp4,98 triliun. "Pembangunan jalan sepanjang 369,11 kilometer dengan alokasi anggaran senilai Rp4,98 triliun ini guna melengkapi aksesibilitas jalan nasional dengan beberapa prioritas," katanya.

Menurutnya, beberapa prioritas tersebut yaitu pembangunan jalan di kawasan perbatasan, pembangunan jalan Trans-Papua, pembangunan jalan akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,

pembangunan jalan akses menuju *outlet* yaitu pelabuhan dan bandara.

Kemudian, pembangunan jalan dilaksanakan untuk akses menuju kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, penanganan jalan di pulau kecil terluar, dan penuntasan pembangunan jalan pantai selatan Jawa, serta pembangunan jalan lintas pulau dan *missing link* pendukung jalur logistik nasional.

"Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki pagu anggaran Rp42,95 triliun dengan target prioritas untuk TA 2020 ini yaitu infrastruktur jalan senilai Rp26,96 triliun dan infrastruktur jembatan Rp8,74 triliun, sisanya untuk [keperluan rutin]," jelasnya.

Adapun, untuk jembatan, alokasi Rp8,74 triliun di antaranya meliputi pembangunan jembatan, penggantian jembatan, preservasi jembatan termasuk rehabilitasi berkala, pelebaran. Kemudian, preservasi rutin jembatan, pembangunan jalan layang atau jalan lintas bawah atau terowongan.

Sugiyantanto mengatakan bahwa Ditjen Bina Marga secara rutin melakukan pemeliharaan rutin untuk infrastruktur jalan.

"Memang wilayah kerjanya dari

“

Anggaran yang dapat dihemat jika tidak terjadi ODOL ... rata-rata Rp43,45 triliun per tahun.

Aceh sampai Papua, dilakukan pemeliharaan rutin. [Pemeliharaan juga] termasuk teman-teman yang mengelola tol dari BPJT [Badan

Pengatur Jalan Tol], ada pembenahan bersama-sama juga," katanya Sementara itu, selama 2019, Ditjen Bina Marga membangun jalan sepanjang 456,43 kilometer dengan penggunaan anggaran Rp4,67 triliun.

"Jalan yang dibangun pun meliputi jalan perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua. [Kemudian] pembangunan jalan Trans-Papua, pembangunan jalan mendukung Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan pembangunan jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," ujar Sugiyantanto. ☒

